

PEMERINTAHAN DESA

2025

PERDA KAB. PANGANDARAN NO. 7, LD 2025/ NO. 7, 70 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta untuk menyesuaikan pengaturan tentang desa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga Peraturan Daerah sebelumnya perlu diganti.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2007, UU UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telahh beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PERMENDES PERMENDES PDTT No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah engan PERMENDES PDTT No.6 Tahun 2023.
 - Peraturan ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Pangandaran. Materi pokok yang diatur meliputi ketentuan umum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukan desa dalam sistem pemerintahan daerah, serta penataan desa yang mencakup pembentukan, penggabungan, penghapusan, perubahan status desa menjadi kelurahan, dan penetapan desa. Selain itu, peraturan ini mengatur kewenangan desa yang bersumber dari hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, diatur secara rinci mengenai susunan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan perangkat desa, termasuk tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, masa jabatan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta atribut dan administrasi kepegawaian desa. Peraturan ini juga mengatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, mekanisme pengisian dan pemberhentian anggota BPD, hingga pembiayaan operasionalnya. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh guna mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- CATATAN :
- Perda ini mula berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2025.
 - Dengan berlakunya Perda ini, Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.
 - Jumlah penjelasan 6 halaman.